

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELEKTRONIC GOVERNMENT* PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Aida Fitriani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
Jln.Oevang Oeray Nomor: 92 Banning Kota Sintang
Email: aidafitriani45@gmail.com

Abstrak: Bentuk pelayanan pemanfaatan *e-government* oleh pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan fungsi pemerintahan meliputi fungsi: pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian. Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan, fungsi administrasi dan manajemen, fungsi legislasi, fungsi pembangunan, fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Pengguna *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah instansi pemerintah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha pers, LSM/Ngo's, dan ormas. Akses pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang cukup sulit. Intensitas pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang masih rendah. Intensitas pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi administrasi dan manajemen dan fungsi legislasi juga masih rendah. Sedangkan intensitas pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pembangunan, fungsi keuangan daerah dan fungsi kepegawaian dikategorikan sangat rendah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Electronic Government*

Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam Ilmu Administrasi Negara. Organisasi Pemerintahan (Publik) sebagai fokus dalam Ilmu Administrasi Negara selalu mengkaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya yang cukup penting adalah informasi. Bahkan menurut Murdick (dalam Kumorotomo, 2001: 83) informasi ini dianalogikan sebagai “darah” dalam organisasi. Ini berarti kalau “aliran darah” mengalami hambatan, maka organisasi akan jatuh pada posisi yang tidak sehat. Indikator kesehatan organisasi akan terlihat pada lancar atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Ketidakstabilan dalam pencapaian tujuan karena terhambatnya informasi termanifestasikan dalam : hasil keputusan yang tidak menggambarkan persoalan yang dihadapi karena memang tidak didukung oleh informasi yang berkualitas yang dibarengi dengan proses komunikasi yang tidak sampai sasaran baik karena kesalahan pengguna atau penyaji output dari analisis sistem yang mempengaruhi proses menajemennya. Adapun komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen dalam organisasi pemerintahan menurut Kumorotomo (2001: 84) adalah sebagai berikut Sistem informasi yang meliputi sistem diskursus dan interaksi antara individu dan kelompok kerja di dalam organisasi. Sistem formal meliputi sistem aturan, batasan-batasan organisasi dan batasan-batasan kewenangan. Sistem komputer formal yang meliputi aktifitas-aktifitas organisasi melalui formulasi dan pemrograman. Sistem komputer

informal yang dikaitkan dengan penanganan komputer secara personal dan kemungkinan penggunaan sistem formal jaringan komputer sebagai sarana penyatuan informasi yang tidak terstruktur. Sistem eksternal, formal dan informal dari organisasi pemerintahan itu sendiri.

Kelima komponen tersebut di atas saling berinteraksi satu sama lain. Komponen sistem informasi tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan perkembangan yang cukup baru yakni pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan yang biasanya muncul dalam segi organisasi pemerintahan adalah pada sistem dan prosedur. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi pemerintahan biasanya diwarnai dengan sistem yang begitu tersentralistik dan seragam untuk semua departemen atau bagian. Perubahan-perubahan yang muncul yang berkaitan dengan perkembangan teknologi akan sulit sekali diterima sebagai realita yang harus diterima. Dengan kata lain tingkat adaptasi organisasi pemerintahan terhadap perubahan sesungguhnya sangat rendah. Rendahnya tingkat adaptasi organisasi pemerintahan terhadap perubahan dibandingkan dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi pada tahap selanjutnya akan menghambat peranan Sistem Informasi Manajemen itu sendiri. Adapun mengenai lingkup orientasi dan isi dari tugas-tugas yang tercakup dalam Sistem Informasi Manajemen di daerah (SIMDA) tampaknya di seluruh Indonesia masih terdapat variasi. Namun secara umum

menurut Wenny Setiawati (2008:12) ada tiga bentuk SIMDA yaitu Sistem informasi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Bidang-bidang yang digarap antara lain menyangkut manajemen pengawasan, administrasi perkantoran atau pengembangan statistik. Sistem informasi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan daerah. Antara lain mencakup aplikasi seperti manajemen perencanaan, manajemen potensi daerah, pertanahan serta manajemen kependudukan. Sistem informasi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Meliputi tugas-tugas seperti manajemen pendapatan daerah, kesehatan, pendidikan, perkreditan atau masalah air minum.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (2001:110) bentuk pemanfaatan *E-Government* pada umumnya adalah sebagai berikut Bentuk Pemanfaatan *E-Government* untuk pelayanan meliputi Kependudukan, Perpajakan dan Retribusi, Pendaftaran Dan Perijinan, Bisnis Dan Investasi, Pengaduan Masyarakat, Publikasi Informasi Umum Dan Kepemerintahan. Bentuk Pemanfaatan *E-Government* untuk Administrasi dan Manajemen meliputi Surat Elektronik, Dokumen Elektronik, Sistem Pendukung Keputusan, Kolaborasi dan Koordinasi, Manajemen Pelaporan Pemerintahan. Bentuk Pemanfaatan *E-Government* untuk Legislasi meliputi Sistem Administrasi DPRD, Sistem Pemilu Daerah, Katalog Hukum, Peraturan Dan Perundang-Undangan. Bentuk Pemanfaatan *E-Government* untuk Pembangunan meliputi Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengelolaan Dan Monitoring Proyek, Sistem Evaluasi dan Informasi Pembangunan. Bentuk Pemanfaatan *E-Government* untuk Keuangan Daerah meliputi Sistem Anggaran, Sistem Kas Dan Perbendaharaan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Bentuk Pemanfaatan *E-Government* untuk Kepegawaian meliputi Pengadaan PNS, Sistem Absensi dan Penggajian PNS, Penilaian Kinerja PNS, Sistem Pendidikan dan Pelatihan PNS.

Dalam konteks *E-Government*, Sistem Informasi harus berbasis komputer, karena langkah pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan *E-Government* adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam SI. Untuk memperlancar otomatisasi tersebut digunakan teknologi ICT yang mendukung yaitu komputer yang menggunakan komponen-komponen antara lain data, prosedur, manusia, *software* dan *hardware*. Namun, Negara yang dapat menjalankan *E-Government* hanyalah Negara-negara maju, karena untuk mencapai

kesinergian SI dari berbagai lembaga pemerintahan adalah hal yang sangat sulit. Di Indonesia sendiri, konsep *E-Government* mulai dibicarakan sejak 2001, yaitu sejak Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Secara pokok, Inpres tersebut mencanangkan suatu Kerangka Teknologi Informasi Nasional/KTIN. Visi dan kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN), adalah untuk mewujudkan masyarakat telematika Nusantara berbasis pengetahuan di tahun 2020, dengan berlandaskan faktor-faktor seperti di bawah ini Prasarana, yang terdiri dari prasarana TI dan telekomunikasi, sumber daya manusia dan industri TI. Hukum, yang akan ditegaskan dalam perangkat hukum telematika. Organisasi, yaitu badan koordinasi TI Nasional. Keuangan, dengan menjalankan mekanisme pendanaan dengan paradigma baru.

Dengan landasan seperti di atas, menurut Tim Koordinasi Telematika Indonesia (2001) akan dibangun pilar-pilar penunjang terwujudnya tujuan dari KTIN seperti : *E-bussines* untuk mendukung usaha kecil dan menengah, TI untuk pendidikan, *E-Government for good governance*, TI berbasis masyarakat dan *E-democracy*. Dengan melihat KTIN tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep *E-Government* di Indonesia sudah mulai diterapkan dan dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia terutama daerah yang menerapkan otonomi daerah. Ada beberapa pendapat yang muncul baik dari segi positif maupun negatifnya. Salah satu sisi berpendapat bahwa konsep *E-Government* sangat menguntungkan karena akan mempermudah proses pelayanan pemerintah ke masyarakat. Selain itu, juga akan memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi mengenai kegiatan pemerintahan. Namun disisi lain, ada yang khawatir pemerintah hanya menganggap konsep *E-Government* hanya semata-mata otomatisasi sistem tetapi tetap tidak mengubah cara kerja pemerintah sehingga esensi dari tujuan Pelaksanaan *E-Government* tidak tercapai.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Alasan pemilihan metode ini agar dapat mendapatkan jawaban yang lebih mendalam mengenai Implementasi Kebijakan *Electronic Government* Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang . Sumber data dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Santel Dan PDE, Operator komputer/*e government* pada badan/dinas instansi

di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, Warga masyarakat pengguna *e government*. Teknik *purposive* digunakan untuk menetapkan warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik melalui *e government* dimaksud. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan dimana peneliti ingin meneliti. Penentuan informan sumber data masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah penulis di lapangan. Maka dalam penelitian ini informan yang dijadikan sumber data jumlahnya dapat diketahui setelah penelitian selesai. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, Observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data bersifat kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemanfaatan teknologi informasi telah semakin luas. Penggunaan teknologi informasi telah merambah bidang perdagangan, pendidikan, pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. Hal ini dikarenakan teknologi informasi

memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang murah. Dengan menggunakan teknologi informasi, terwujudlah suatu efisiensi dalam gerak kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari interaksi tersebut. Oleh sebab itu teknologi informasi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, dan dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan, teknologi ini mulai diterapkan dalam praktek pemerintahan. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang politik negara dan pemerintahan serta berwenang terhadap semua urusan yang berada dalam lingkup hukum publik yang bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan kesejahteraan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dan dalam menjalankan semua tugas tersebut, pemerintah memerlukan informasi yang akan digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Informasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah diproses oleh suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menginterpretasikan, mengambil, menyampaikan dan menggunakan informasi.

Tabel 1 Perubahan Pada Proses Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Yang Diharapkan Dalam *E-Government*

Sebelum	Sesudah
Proses kerja pemerintah menggunakan kertas	Proses dokumen berbasis elektronik
Prosedur berorientasi departemen	Prosedur berorientasi pelayanan
Banyaknya jalur kontak ke pemerintah dan kunjungan personal (tatap muka) ke kantor-kantor pemerintah	Jalur kontak tunggal dan akses <i>online</i> , sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan
Manajemen sumber daya informasi tingkat departemen, dengan banyaknya duplikasi dan pemborosan antar departemen yang berbeda	Manajemen sumber daya informasi terintegrasi menggunakan standar umum dan ditandai dengan konvergensi

Keuntungan Kesuksesan Pelaksanaan *E-Government* dalam Pemerintah Kabupaten Sintang yang diharapkan adalah adanya perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi proses kerja pemerintah sebagai hasil reformasi berbasis TIK yang efektif. Perubahan-perubahan ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintah dengan mengurangi waktu transaksi dan menghilangkan lapisan birokrasi yang berlebihan. Beberapa contoh fungsi pemerintahan yang penyelenggaraannya dapat

dibantu melalui sistem elektronik adalah, Pelayanan Masyarakat, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset dan sebagainya. Selanjutnya mengenai Pemanfaatan *E-Government* Oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Berdasarkan Fungsi Pemerintahan meliputi fungsi sebagai berikut: pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian. Pemanfaatan *e-Government* Berdasarkan Fungsi Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Pemerintahan

No	Bentuk Pemanfaatan	Kegiatan
1	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kependudukan 2. Perpajakan dan Retribusi 3. Pendaftaran dan Perijinan Bisnis dan Investasi 4. Informasi Umum 5. Pemerintahan
2	Administrasi dan Managemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Elektronik 2. Sistem Dokumen Elektronik 3. Sistem Pendukung Keputusan Kolaborasi dan Koordinasi Manajemen Pelaporan Pemerintahan
3	Legislasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Administrasi DPRD 2. Sistem Pemilu Daerah /KPU 3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan (Setda)
4	Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pemb. 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Sistem Perencanaan Proyek Pengelolaan Dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi & Info Pembangunan
5	Kuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Anggaran 2. Sistem Kas dan Perbendaharaan 3. Sistem Akuntansi Daerah
6	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan PNS 2. Sistem Absensi dan Penggajian 3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 4. Sistem Pendidikan dan Latihan

Pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pemerintahan dikelompokkan pada 6 (enam) aspek yaitu: (1) Bentuk Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Pelayanan, (2) Bentuk Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Administrasi dan Managemen, (3) Bentuk Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Legislasi, (4) Bentuk Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Pembangunan, (5) Bentuk Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Keuangan Daerah dan, (6) Bentuk Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Kepegawaian. Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan terdiri atas: kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan bisnis dan investasi pengaduan masyarakat publikasi, informasi umum dan pemerintahan. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang operator komputer/*e government* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di

bidang kependudukan meliputi: pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk, pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP, pembuatan dan pengelolaan data akta pencatatan penduduk (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak), pembuatan buku induk penduduk, buku mutasi penduduk dan buku tamu, pelaporan data kependudukan. Modul kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada mendagri). Sebagian data kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat. Pemanfaatan *E-Government* untuk pelayanan di bidang kependudukan dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Integrasi dilakukan untuk Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota lain Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain Sistem

Kependudukan di tingkat Nasional. Pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang perpajakan dan retribusi meliputi, memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan pajak dan retribusi yang berkaitan dengan potensi daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan.

Pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang pendaftaran dan perijinan adalah memberikan pelayanan perijinan meliputi kegiatan: menerima pendaftaran, menyeleksi persyaratan, memberikan keterangan, mengecek kemajuan proses penerbitan perijinan dan menindak lanjuti pengaduan/klaim dari masyarakat. Pendaftaran dan perijinan adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pelayanan perijinan bagi masyarakat yang meliputi : jenis-jenis layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan untuk memperoleh ijin, prosedur perijinan, biaya dan waktu proses perijinan yang diperlukan. Aplikasi dilengkapi dengan form yang bisa di *download* atau diisi secara *on-line*. Aplikasi juga dilengkapi dengan formulir dari set dokumentasi yang dipakai untuk mengurus pendaftaran dan perijinan yang disimpan dalam suatu basis data sedemikian sehingga dapat dijamin keseragaman dan tertib administrasinya.

Pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang bisnis dan investasi adalah memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi. Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasidi daerah tersebut. Pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang publikasi informasi umum dan pemerintahan adalah mempublikasikan semua informasi umum dan pemerintahan ke seluruh masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat. ?rekomendasi yang diharapkan dari pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang publikasi informasi umum dan pemerintahan adalah membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi publikasi ke masyarakat.

Pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Bentuk pemanfaatan yang belum optimal tersebut seperti, pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang perpajakan dan retribusi, pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang pendaftaran

dan perijinan, pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang bisnis dan investasi, serta pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan di bidang pengaduan masyarakat. Faktor penyebab hal tersebut adalah belum tersedianya fasilitas dimaksud serta belum merupakan prioritas untuk dilaksanakan. Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi administrasi dan manajemen terdiri atas: surat elektronik, sistim dokumen elektronik, sistim pendukung keputusan kolaborasi dan koordinasi manajemen pelaporan pemerintahan. Pemanfaatan *e-government* di bidang surat elektronik adalah menyediakan fungsi surat-menyerut secara elektronik, termasuk didalamnya memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik.

Penyediaan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi. Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan. Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi) berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya dokumen daerah (yang ditempatkan dalam lembaran daerah), arsip daerah, dan lain-lain. Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy menjadi bentuk softcopy. Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari berbagai sumber dalam berbagai macam format dokumen. Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap, akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal, versi / revisi, nomor, dan lain-lain. Pemanfaatan *e-government* di bidang sistem pendukung keputusan adalah membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat. Menyajikan informasi sesuai tingkat urgensi misalnya: masalah darurat, masalah penting dan masalah yang kurang penting. Pemanfaatan *e-government* di bidang kolaborasi dan koordinasi adalah menyediakan fungsi pengelolaan agenda (penyiapan agenda, alokasi waktu, pengingat tanggal, partisipan, dan lain-lain). Contoh: pengelolaan agenda kerja tiap unit organisasi, menyediakan fungsi *task to do* (penjadwalan), misalnya rapat. Sistem dengan mudah dapat mengalokasikan jadwal rapat, menyesuaikan dengan agenda dari peserta yang harus diundang, distribusi undangan, pemakian ruang rapat dan sebagainya.

Pemanfaatan *e-government* di bidang manajemen pelaporan pemerintahan adalah menyediakan sarana pelaporan eksekutif (pemerintah daerah) kepada instansi yang lebih atas

sampai ke pemerintah pusat melalui mendagri menyediakan laporan-laporan dengan format baku, dengan data yang sudah diolah. Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi administrasi dan manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Bentuk tersebut adalah pemanfaatan *e-government* di bidang sistem pendukung keputusan, pemanfaatan *e-government* di bidang kolaborasi dan koordinasi serta pemanfaatan *e-government* di bidang manajemen pelaporan pemerintahan.

Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi legislasi terdiri dari: Sistem Administrasi DPRD, Sistem Pemilu Daerah, serta Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang operator komputer/*e government* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang diketahui bahwa Pemanfaatan *E-Government* di Bidang Sistem Administrasi DPRD adalah memfasilitasi pekerjaan Sekretaris DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, memfasilitasi pekerjaan DPRD seperti penjadwalan rapat, dan pengelolaan dokumen hasil rapat, pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Pemanfaatan *E-Government* Di Bidang Sistem Pemilu Daerah adalah Memfasilitasi pelaksanaan sistem pemilihan umum daerah, dimulai dari proses pendaftaran pemilih, pemilihan dan penghitungan suara hasil pemilu.

Pemanfaatan *E-Government* Di Bidang Katalog Hukum, Peraturan Dan Perundang-Undangan adalah Menyediakan basis data semua produk hukum, peraturan dan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, juga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah. Bentuk Pemanfaatan *E-Government* berdasarkan fungsi legislasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Bentuk pemanfaatan *e-government* yang belum optimal tersebut terutama adalah di bidang sistem administrasi DPRD. Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pembangunan terdiri dari: sistem informasi dan manajemen data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, sistem perencanaan proyek pengelolaan dan monitoring proyek sistem evaluasi dan info pembangunan. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang operator komputer/*e government* pada Bappeda Kabupaten Sintang diketahui bahwa pemanfaatan *e-government* di bidang sistem informasi dan manajemen data pembangunan

adalah menyediakan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung-jawabkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan. Data dan informasi yang dimaksud meliputi: penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah, Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS, Keuangan daerah, Potensi sumber daya daerah, Produk hukum daerah, Kependudukan serta Informasi dasar kewilayahan. Pemanfaatan *e-government* di bidang perencanaan pembangunan daerah adalah pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek pembangunan sesuai kewenangan pemda perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun) harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pemanfaatan *e-government* di bidang sistem pengadaan barang dan jasa adalah menyediakan template dan alur kerja elektronik untuk mempersiapkan proyek (pengadaan barang dan jasa) sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 sebagai basis data (katalog) proyek, merangkum semua data-data berkaitan dengan semua proyek (pengadaan barang dan jasa) yang pernah dilaksanakan pemda, menyediakan fungsi penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah disetujui agar terjadi sinergi pembangunan di seluruh wilayah pemerintahan daerah, masukan bagi proses pengelolaan dan monitoring proyek menyediakan sarana untuk pengumuman pekerjaan (disesuaikan dengan sifat pekerjaan) dan proses pendaftaran bagi para penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemda, termasuk pengumuman siapa yang menjadi pemenang (pelaksana) pekerjaan.

Pemanfaatan *e-government* di bidang pengelolaan dan monitoring proyek adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pekerjaan (proyek) yang dimaksud meliputi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis pemda, termasuk kecamatan dan kelurahan.???membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan. Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana dengan kemajuan fisik). Menyediakan template pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda)

yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang ada di daerah.

Pemanfaatan *e-government* di bidang sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk kecamatan dan kelurahan, menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan. Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala Bappeda) yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan yang ada di daerah.

Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Fungsi tersebut terutama Pemanfaatan *E-Government* Di Bidang Pengelolaan Dan Monitoring Proyek dan Pemanfaatan *E-Government* Di Bidang Sistem Evaluasi Dan Informasi Hasil Pembangunan. Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi keuangan daerah terdiri dari: sistem anggaran, sistem kas dan perbendaharaan, serta sistem akuntansi daerah. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang operator komputer/*e government* pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) diketahui bahwa pemanfaatan *e-government* di bidang sistem anggaran adalah menyusun perencanaan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menampung usulan anggaran semua unit kerja, membantu proses verifikasi besaran uang dan ketepatan pos rekening dari setiap usulan, serta memfasilitasi proses scrubbing, revisi-revisi dan pembahasan di Tim Anggaran untuk diajukan ke Panitia Anggaran. Mencetak dokumen anggaran: APBD, RASK, DASK, dan lain-lain. Menyediakan fungsi analisa standar belanja, bertujuan untuk melihat kewajaran besaran nilai usulan kegiatan yang diajukan unit kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan rencana kegiatan yang diajukan. Menyediakan fungsi penyusunan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan. Menyimpan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan dalam suatu basis data yang bisa dipakai sebagai rujukan

Pemanfaatan *e-government* di bidang sistem kas dan perbendaharaan adalah menyediakan fungsi kas anggaran, melakukan sinkronisasi antara pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk

membantu agar pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak mengalami masalah keuangan. Menyediakan fungsi monitoring terhadap realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Menyediakan fungsi pengelolaan kas daerah, mencatat dan mengelola arus keluar, arus masuk dan penyimpanan uang pmda. Membantu proses pembayaran keuangan kepada pihak yang telah ditunjuk. Menerima dana masukan dari perolehan setoran pendapatan dari unit organisasi / pihak penyeter. Pemanfaatan *e-government* di bidang sistem akuntansi keuangan daerah adalah mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan daerah. Menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi dan mengelompokkan data-data transaksi untuk keperluan penyusunan buku besar. Bentuk Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Fungsi tersebut baik untuk sistem anggaran, sistem kas dan perbendaharaan maupun sistem akuntansi keuangan daerah. Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi kepegawaian terdiri dari: Pengadaan PNS, Sistem Absensi dan Penggajian, Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan dan Latihan. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang operator komputer/*e government* pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang diketahui bahwa pemanfaatan *E-Government* Di Bidang Pengadaan PNS adalah melakukan administrasi dan pengelolaan data pengadaan pegawai sipil, termasuk didalamnya persyaratan dan tatacara rekrutmen Menyediakan fungsi kerangka kerja (workflow) rekrutmen pegawai PNS dari mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima) Menyediakan basis data pelamar (CPNS) dan modul pelaporannya yang dapat diklasifikasikan, misal per periode pengadaan, jenis kelamin, kelompok umur, daya tampung.

Pemanfaatan *E-Government* di bidang sistem absensi dan penggajian PNS adalah menyediakan fungsi absensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja. Menyediakan fungsi pengelolaan data-data absensi pegawai, termasuk didalamnya pengelolaan data cuti dan libur pegawai. Menyediakan fungsi kalender yang dapat di atur khusus untuk instansi / tertentu. Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan jam kerja pegawai perbulan dengan kategorisasi per satuan kerja, per golongan gaji, per jenis kelamin, menyediakan fungsi penggajian pegawai. Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan

penggajian dengan kategorisasi jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar per satuan kerja.

Pemanfaatan *E-Government* Di Bidang Penilaian Kinerja PNS adalah menyediakan fungsi penilaian kinerja pegawai untuk keperluan kenaikan pangkat dan promosi jabatan. Menyediakan fungsi untuk memungkinkan sosialisasi larangan, dan sistem pemberian sanksi dan penghargaan. Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan pegawai. Pemanfaatan *E-Government* di bidang sistem pendidikan dan pelatihan PNS adalah menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai. Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya. Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT, Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer.

Bentuk Pemanfaatan *E-Government* berdasarkan Fungsi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk melaksanakan *E-Government*, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan kebutuhan akan

pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam organisasi. *E-Government* diharapkan dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat karena *E-Government* meningkatkan interaksi langsung antara kantor-kantor pemerintah dengan masyarakat, dan membuat informasi menjadi tersedia secara universal dan bebas. Pada akhirnya, penggunaan *E-Government* dapat membuat reformasi pemerintahan menjadi lebih mudah. Melaksanakan *E-Government* artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Sebagaimana pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pemerintahan, maka pengguna *E-Government* juga dapat dikelompokkan pada 6 (enam) aspek yaitu: (1) Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Pelayanan, (2) Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Administrasi dan Manajemen, (3) Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Legislasi, (4) Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Pembangunan, (5) Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Keuangan Daerah dan, (6) Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Kepegawaian.

Tabel 3. Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

No	Pemanfaatan <i>E-Government</i>	Pengguna <i>E-Government</i>
1	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Untuk Pelayanan Di Bidang Kependudukan	Instansi pemerintah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat
2	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Untuk Pelayanan Di Bidang Perpajakan Dan Retribusi	Dunia Usaha, masyarakat
3	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Untuk Pelayanan Di Bidang Pendaftaran Dan Perijinan	Dunia Usaha, masyarakat
4	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Untuk Pelayanan Di Bidang Bisnis Dan Investasi	Dunia Usaha, masyarakat
5	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Untuk Pelayanan Di Bidang Pengaduan Masyarakat	Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas
6	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Untuk Pelayanan Di Bidang Publikasi Informasi Umum Dan Kepemerintahan	Instansi pemerintah, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengguna *E-Government* berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri atas, Instansi pemerintah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dunia

usaha, masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas. Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Administrasi Dan Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Administrasi Dan Manajemen Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

No	Pemanfaatan <i>E-Government</i>	Pengguna <i>E-Government</i>
1	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Surat Elektronik	Perangkat daerah
2	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Dokumen Elektronik	Perangkat daerah
3	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Pendukung Keputusan	Perangkat daerah
4	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Kolaborasi Dan Koordinasi	Perangkat daerah
5	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Manajemen Pelaporan Pemerintahan	Perangkat daerah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengguna *E-Government* berdasarkan fungsi Administrasi dan Manajemen adalah perangkat daerah Kabupaten Sintang.

Selanjutnya, pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Legislas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Legislasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

No	Pemanfaatan <i>E-Government</i>	Pengguna <i>E-Government</i>
1	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Adminisitrasi DPRD	DPRD, Parpol
2	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Pemilu Daerah	KPU, Parpol, Pers, masyarakat, LSM
3	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Katalog Hukum, Peraturan Dan Perundang-Undangan	Instansi pemerintah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengguna *E-Government* berdasarkan fungsi legislasi adalah: DPRD, KPU, Parpol, Pers, masyarakat, LSM. Pengguna *E-*

Government Berdasarkan Fungsi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

No	Pemanfaatan <i>E-Government</i>	Pengguna <i>E-Government</i>
1	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Informasi Dan Manajemen Data Pembangunan	Instansi pemerintah, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas
2	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Instansi pemerintah, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas
3	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa	Instansi pemerintah, dunisa usaha, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas
4	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Pengelolaan Dan Monitoring Proyek	Instansi pemerintah, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas
5	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Evaluasi Dan Informasi Hasil Pembangunan	Instansi pemerintah, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas

Sumber : Bagian Santel dan PDE Setda Kabupaten Sintang, 2011.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengguna *E-Government* berdasarkan fungsi pembangunan adalah Instansi pemerintah, dunisa usaha, Masyarakat, pers, LSM/

Ngo's, ormas. Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

No	Pemanfaatan <i>E-Government</i>	Pengguna <i>E-Government</i>
1	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Anggaran	Instansi pemerintah, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas
2	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Kas Dan Perbendaharaan	Instansi pemerintah, DPRD
3	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Akuntansi keuangan Daerah	Instansi pemerintah, DPRD, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengguna *E-Government* berdasarkan fungsi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Instansi pemerintah,

DPRD, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas. Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Pengguna *E-Government* Berdasarkan Fungsi Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

No	Pemanfaatan <i>E-Government</i>	Pengguna <i>E-Government</i>
1	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Pengadaan PNS	Instansi pemerintah, masyarakat
2	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Absensi Dan Penggajian PNS	Instansi pemerintah
3	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Penilaian Kinerja PNS	Instansi pemerintah
4	Pemanfaatan <i>E-Government</i> Di Bidang Sistem Pendidikan Dan Pelatihan PNS	Instansi pemerintah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengguna *E-Government* berdasarkan Fungsi Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Instansi pemerintah, masyarakat (pelamar PNS). Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus menggunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem

elektronik. Sistem *e government* tidak saja menyangkut infrastruktur jaringan sebagai sarana komunikasi data dan aksesibilitas informasi tetapi juga menyangkut infostruktur yang menyangkut struktur data dan proses sistem informasi sebagai landasan bagi aplikasi sistem informasi pemerintah. Pemmasalahan jaringan Infrastruktur yang dihadapi tidak semata-mata menyangkut masalah teknis fisik semata, tetapi juga mencakup masalah kepemimpinan, sumberdaya manusia, regulasi dan faktor-faktor prosedural seperti keamanan, kewenangan pengelolaan data dan cetak biru arsitektur sistem yang belum dimiliki oleh setiap instansi maupun lembaga pemerintahan.

Akses Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang cukup sulit. Hal ini disebabkan untuk mengakses pelayanan yang disediakan butuh waktu yang lama serta walaupun dapat diakses tidak tersedia data yang memadai. Akses Pemanfaatan *E-Government* -*Government* Di Bidang Surat Elektronik cukup mudah dilakukan. Surat Elektronik dimaksud adalah berupa *e-mail* yang disampaikan. Sedangkan Dokumen Elektronik justru sangat sulit. Dokumen Elektronik ini adalah berupa dokumen-dokumen penyelenggaraan pembangunan seperti LAKIP, Renstra, RPJM dan sebagainya. Akses Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi legislasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang cukup mudah dilakukan hanya untuk Sistem Pemilu Daerah serta Bidang Katalog Hukum, Peraturan Dan Perundang-Undangan. Sedangkan Bidang Sistem Administrasi DPRD sangat sulit. Hal ini disebabkan belum tertibnya administrasi di DPRD Sintang sehingga data yang tersedia juga belum memadai. Akses Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mudah di dapat adalah untuk Sistem Informasi Dan Manajemen Data Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan akses untuk Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengelolaan Dan Monitoring Proyek serta Sistem Evaluasi Dan Informasi Hasil Pembangunan sangat sulit dilakukan. Penyebabnya adalah aplikasi hasl tersebut belum tersedia serta belum tertibnya administrasi pada bidang-bidang tersebut karena adanya kebijakan-kebijakan yang memang tidak dapat dipublikasikan secara luas. Akses Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sangat sulit dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga masyarakat pengguna *e government*, diketahui bahwa akses Pemanfaatan *E-Government* Berdasarkan Fungsi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sangat sulit dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk pelayanan pemanfaatan *e-government* oleh pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan fungsi pemerintahan meliputi fungsi: pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian. Bentuk pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan, fungsi administrasi dan manajemen, fungsi legislasi, fungsi pembangunan, fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Pengguna *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah instansi pemerintah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha pers, LSM/Ngo's, dan ormas. Akses pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sintang cukup sulit. Akses pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi administrasi dan manajemen cukup mudah dilakukan. Akses pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi legislasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang cukup mudah dilakukan. Akses pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pembangunan sangat sulit dilakukan. Akses pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi keuangan daerah sangat sulit dilakukan. Akses pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi kepegawaian di sangat sulit dilakukan. Intensitas pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang masih rendah.

Intensitas pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi administrasi dan manajemen dan fungsi legislasi juga masih rendah. Sedangkan intensitas pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pembangunan, fungsi keuangan daerah dan fungsi kepegawaian dikategorikan sangat rendah. Berdasarkan ruang lingkup faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan kebijakan *E-Government* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut: Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam memanfaatkan *E-Government*. Sesuai dengan Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Bupati diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government*. Kualitas sumber daya manusia yang terdapat di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, baik dalam memasang jaringan, mengoperasikannya maupun dalam memelihara fasilitas *e government* yang tersedia.

Anggaran bagi pengadaan peralatan penunjang fasilitas *e government*. Hal ini disebabkan dana yang tersedia lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sintang yaitu sektor transportasi, pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (PNS) yang terdapat di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang dalam memasang jaringan, mengoperasikan serta memelihara fasilitas *E-Government* perlu dilakukan pendidikan dan latihan secara kontinyu terhadap PNS yang ada. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan mengirimkan atau menyekolahkan PNS khusus untuk menangani fasilitas *E-Government* tersebut. Pada masa-masa mendatang anggaran bagi pengadaan peralatan penunjang fasilitas *E-Government* dapat terus ditingkatkan mengingat arti penting *E-Government* itu sendiri dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara, 2001. *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Danim, S. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dudung. 2005. *Teknologi Informasi Strategi Menuju E-Government*. Diambil 23 Maret 2005, dari Situs Word Wide Web <http://www.dudung.net/teknologi-informasi/6-strategi-menuju-e-government.html>
- Effendi, S. 1996. *Sistem Administrasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Dalam Samoedra Wibawa (ed). *Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hadiati dan Sukadarto. 2001. *Manajemen SDM, Keuangan dan Materiil*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Kaho, R. J. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kumorotomo. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: BPEE-UGM.
- Moekijat. 1989. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Natakusumah, E.K. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian informatika LIPI.
- _____. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran Jarak Jauh*. Orasi Ilmiah disampaikan pada Wisuda STMIK BANDUNG.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sedarmayanti, 2001. *Dasar-Dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Siagian, SP. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemirat, S dan Ardianto, E. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno dan Sanusi. 2001. *Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Renaissance Research Centre.
- The World Bank Group. 2009. *E-government definition*. Diambil 4 Januari 2009, dari situs Word Wide Web <http://www1.worldbank.org/publicsektor/egov/definition.htm>.
- Tim Koordinasi Telematika Indonesia. 2001. *Kerangka Teknologi Informasi Nasional*. Jakarta, Februari 2001.
- Tjokroadmidjojo, B. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Pendidikan Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana.
- Wenny Setiawati. 2008. *Penerapan E-Government Di Indonesia*. Diambil 7 Desember 2008, dari Situs Word Wide Web <http://www.pemantau.peradilan.com>
- Winarno, B., 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.